**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Landasan Teori**
2. ***Good Governance***

Mardiasmo (2009:25) menyatakan bahwa:

“*good governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance,* diharapkan dalam menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dapat diselenggarakan dengan baik”.

*Good governance* memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia *good governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Maksudnya baik yaitu pemerintahan negara yang berkaitan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat. Sedangkan pemerintahan yang bersih merupakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab.

Menurut Sedarmayanti (2009:280) yang terlibat dalam *good governance*, antara lain:

* 1. Negara/pemerintahan

Konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.

* 1. Sektor swasta

Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengelohan perdagangan, perbankan dan koperasi serta termasuk juga kegiatan sektor informal. Dalam bidang pendidikan, sektor swasta meliputi yayasan-yayasan yang mengelola sekolah swasta.

* 1. Masyarakat madani

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan ada yang dinamakan Dewan Pendidikan yang merupakan lembaga independen yang yang memiliki posisi sejajar dengan Bupati.Walikota dan DPRD.

Menurut Mardiasmo (2009:18), prinsip-prinsip dasar *good governance* terdiri dari lima hal, yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

1. Transparansi (*Transparancy),* Menurut UNDP transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi yang membutuhkan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*), adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
3. Responsibilitas (*Responsibility*), menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta kebijakan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik.
4. Independensi (*Independency*), demi kelancaran pelaksanaan *good governance,* instansi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian instansi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness)*, merupakan perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, instansi harus senantiasa memperhatikan kepentingan organisasi berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa *good governance* (tata kelola pemerintah yang baik) merupakan suatu tatanan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Demi mewujudkan praktik *good governance* di Indonesia, perlu adanya komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat yaitu negara/pemerintah, pelaku sektor swasta, dan tentunya masyarakat.

* + 1. **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan daerah, yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah :
2. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
3. Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.
4. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

1. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang tertuang dalam PP No.71 Tahun 2010. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

1. Pengawasan

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Domai (2002:21) tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah :

1. Memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan suatu daerah.
2. Perbaikan dari anggaran daerah sebelumnya. Setiap anggaran daerah yang dibuat/disusun diusahakan perbaikan.
3. Sebagai landasan formal dari suatu kegiatan yang lebih terarah dan teratur dan memudahkan untuk melakukan pengawasan
4. Memudahkan koordinasi dari masing-masing institusi dan dapat diarahkan sesuai dengan apa yang diprioritaskan dan dituju oleh pemerintah daerah
5. Untuk menampung dan menganalisis serta memudahkan dalam pengambilan keputusan tentang alokasi pembiayaan terhadap proyek-proyek atau kebutuhan lain yang diajukan oleh masing-masing institusi.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu cara agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan diadakannya pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar pengelolaan keuangan rakyat yang dipegang oleh pemerintah dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggung jawabannya sehingga akan tercipta akuntabilitas didalam pengelolaannya. Pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik.

1. **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

Menurut Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006,

“Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.”

Sedangkan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,

“Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Menurut Suwanda, dkk (2013:6) unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah meliputi hal-hal berikut ini:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pemimpin instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya.

1. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya sesuatu yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian risiko adalah salah satu unsur SPIP yang sangat penting.

1. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

1. Informasi dan Komunikasi

Definisi informasi adalah data yang telah diolah yang dapat dilakukan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Komunikasi sendiri memiliki pengertian sebagai proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan symbol atau lambing tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

1. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah suatu proses manajemen sumber daya pemerintah dimulai dari pimpinan dan pegawai, untuk mencapai efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Keandalan pelaporan keuangan dibutuhkan untuk tanggungjawab (akuntabilitas) pemerintah dalam penggunaan dana masyarakat. Realisasi dana masyarakat ini harus disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap transparansi penggunaan anggaran daerah. Dengan adanya transparansi maka masyarakat ikut serta memantau pengamanan aset negara dari kemungkinan penyalahgunaan dari pihak internal pemerintah. SPIP haruslah diimplementasikan dengan efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang dihasilkan andal, aset milik negara tetap aman dan peraturan perundang-undangan dipatuhi, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1. **Budaya Organisasi**

Menurut Luthans (2011:137) budaya organisasi adalah pola pemikiran dasar yang diajarkan kepada personel baru sebagai cara untuk merasakan, berfikir dan bertindak secara benar dari hari-kehari. Sedangkan Menurut Robbins & Coulter (2012:51) budaya organisasi adalah nilai, prinsip, tradisi, dan sikap yang mempengaruhi cara bertindak anggota organisasi.

Menurut Robbins & Coulter (2012:52), ada 6 dimensi budaya organisasi yaitu:

1. Inovasi dan keberanian mengambil risiko (*Inovation and risk taking*), adalah sejauh mana organisasi mendorong para karyawan bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Selain itu bagaimana organisasi menghargai tindakan pengambilan risiko oleh karyawan dan membangkitkan ide karyawan.
2. Perhatian terhadap detail (*Attention to detail*), adalah sejauh mana organisasi mengharapkan karyawan memperlihatkan kecermatan, analisis dan perhatian kepada rincian.
3. Berorientasi kepada hasil (*outcome orientation*), adalah sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil dibandingkan perhatian pada teknik dan proses yang digunakan untuk meraih hal tersebut.
4. Berorientasi kepada manusia (*People orientation*), adalah sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi.
5. Berorientasi tim (*Team orientation*), adalah sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim, bukan individu-individu.
6. Sikap agresif (*Aggressivenes*), adalah sejauh mana orang-orang dalam organisasi itu agresif dan kompetitif untuk menjalankan budaya organisasi sebaik-baiknya.

Menurut Rivai (2009:430) budaya melakukan sejumlah fungsi di dalam sebuah organisasi, yaitu:

1. Budaya mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas, artinya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lain.
2. Budaya memberikan identitas bagi anggota organisasi.
3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas dan pada kepentingan individu.
4. Budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial.
5. Budaya memandu serta membentuk sikap dan perilaku pegawai.

Menurut Lako (2004:31), budaya organisasi yang ideal untuk suatu organisasi harus memiliki sedikitnya dua sifat berikut:

* 1. Kuat (*strong*) artinya budaya organisasi yangdibangun atau dikembangkan harus mampu mengikat dan mempengaruhi perilaku para individu, perilaku organisasi untuk menyelesaikan antara tujuan individu dan tujuan kelompok mereka dan tujuan organisasi.
  2. Dinamis dan adaptif (*dynamic and adaptive*) artinya budaya organisasi yang dibangun fleksibel dan responsif terhadap dinamika lingkungan internal dan eksternal organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai yang berisikan norma-norma berperilaku, keyakinan, dan kebiasaan yang diterapkan oleh setiap individu dalam mencapai tujuan organisasi dan juga mempengaruhi cara karyawan dalam bertingkah laku, cara menggambarkan pekerjaan, dan cara bekerja dengan karyawan lainnya.

Budaya organisasi bisa membentuk karakteristik pegawai yang berkerja di dalam suatu pemerintahan. Dengan budaya organisasi yang baik maka akan melekatlah sikap yang baik pada pegawai tersebut. Apabila pegawai pada suatu pemerintahan telah bersikap dengan baik maka hal ini akan menguntungkan pemerintahan tersebut, karena pegawai yang bekerja di dalamnya tidak akan melakukan penyelewengan atau akan patuh terhadap hukum undang-undang yang berlaku. Apabila kondisi itu telah terwujud maka pemerintahan daerah tersebut lebih mudah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan *good governance*, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan budaya organisasi, dapat dilihat pada tabel 2.1:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama (Tahun)** | **Judul Penelitian** | **Variabel Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1. | Mailoor, Jefri Herbert (2017) | Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Empiris di Kabupaten Kepulauan Talaud) | X1 : Sistem Akuntansi Pemerintahan  X2 : Budaya Organisasi  X3 : Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah  X4 : Peran APIP  X5 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  Y : Penerapan *Good Governance* | Sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance.*  Budaya organisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerapan *good governance.*  Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance.*  *.*  Peran APIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance.*  Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance.* |
| 2. | Sari, Weni Nirmala (2017) | Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan *Good governance* (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu) | X1 : Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah  X2 : Pengelolaan Keuangan Daerah  X3 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  X4 : Komitmen Organisasi  Y : Penerapan *Good governance* | Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerapan *good governance.*  Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good governance.*  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good governance*  Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap penerapan *good governance.* |
| 3. | Sari, Darwanis (2016) | Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern terhadap *Good governance* dan Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPA Pemerintah Aceh) | X1 : Sistem Akuntansi Pemerintahan  X2 : Sistem Pengendalian Intern  Y : *Good governance*  Z : Kualitas Laporan Keuangan | Sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap *good governance.*  Sistem akuntansi pemerintahan secara parsial berpengaruh positif terhadap *good governance*.  Sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh positif terhadap *good governance*.  Sistem akuntansi pemerintahan, pengendalian intern, dan *good governance* secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.  Sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan lemah terhadap kualitas laporan keuangan.  Pengendalian intern berpengaruh positif dan lemah terhadap kualitas laporan keuangan.  *Good governance* berpengaruh positif dan sedang terhadap kualitas laporan keuangan. |
| 4. | Syafrion, Fandra Yovano (2015) | Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Penerapan *Good governance*  (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok) | X1 : Sistem Pengendalian Intern  X2 : Pengelolaan Keuangan Daerah  X3: Komitmen Organisasi  X4 : Budaya Organisasi  Y : Penerapan *Good governance* | Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good governance*  Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good governance*  Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap penerapan *good governance*  Budaya Organisasi berpengaruh terhadap penerapan *good governance* |
| 5. | Ristanti, Ni Made Asih (2014) | Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan *Good governance*  (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan) | X1 : Sitem Pengendalian Intern  X2 : Pengelolaan Keuangan Daerah  X3 : Komitmen Organisasi  Y : Penerapan *Good governance* | Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good governance*  Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good governance*  Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap penerapan *good governance* |
| 6. | Lestari, Morita Indah (2013) | Pengaruh Budaya Organisasi dan Pengendalian Intern terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Umum di Kota Padang) | X1 : Budaya Organisasi  X2 : Pengendalian Intern  Y : Penerapan Prinsip-Prinsip *Good* *Corporate Governance* | Semua variable dependen berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan prinsip-prinsip *good* *Corporate governance.* |
| 7. | Ruspina, Depi Oktia (2013) | Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan *Good governance* (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Padang) | X1 : Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah  X2 : Pengelolaan Keuangan Daerah  X3 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)  Y : Penerapan *Good governance* | Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan *Good governance*.  Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapann *Good governance.*  Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penerapan *good governance*. |
| 8. | Wiratno, Adi (2013) | Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pengendalian Intern terhadap Penerapan *Good Governance* | X1 : Budaya Organisasi  X2 : Gaya Kepemimpinan  X3 : Komitmen Organisasi  X4 : Pengendalian Intern  Y : *Good Governance* | Semua variable dependen berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan *good governance.* |
| 9. | Sari, Eka Nurmala (2012) | Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik serta Dampaknya terhadap *Good Governance.* | X : Budaya Organisasi  Y : Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik  Z : *Good Governance* | Semua variable dependen berpengaruh secara signifikan terhadap evektifitas penerapan akuntansi sektor public dan penerapan *good governance.* |

Pada penelitian ini menjelaskan hubungan variabel-variabel penelitian dengan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat mengisi area kekosongan sekaligus juga sebagai penambah teori yang baru dan wawasan kajian teoritis.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang penerapan *good governance*, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan budaya organisasi. Sedangkan perbedaan yang mendasar adalah objek yang diteliti yaitu pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:

H1

Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)

Penerapan *Good governance* (Y)

H3

H2

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2)

H4

Budaya Organisasi (X3)

Keterangan

: Parsial

: Simultan

**Gambar 2.1**

**Skema Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar diatas maka, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Budaya Organisasi secara parsial maupun secara simultan mempengaruhi Penerapan *Good Governance* pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

* 1. **Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis peneliti. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh antara pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance.*

H2 : Terdapat pengaruh antara system pengendalian internal pemerintah terhadap penerapan *good governance.*

H3 : Terdapat pengaruh antara budaya organisasi terhadap penerapan *good governance.*

H4 : Terdapat pengaruh antara pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan budaya organisasi terhadap penerapan *good governance.*